

KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENETAPKAN ANGGARAN DESA MENURUT

UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM PRESPEKTIF FIQH

SIYASAH (STUDI KASUS DESA BIAK MULI KEC.BAMBEL KAB.ACEH TENGGARA)

SKRIPSI

Di Ajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Untuk Memenuhi Salah

Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (SI) Ilmu

Syari'ah Dan Hukum

OLEH :

SANDIKA

23153054



JURUSAN SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

1441 H/ 2021 M

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sandika

Nim : 23153054

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Jurusan : Siyasa

Tempat/tinggal Lahir : Biak muli/ 07 April 1997

Judul skripsi : **KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENYUSUN DAN MENETAPKAN ANGGARAN DESA MENURUT UNDANG UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM PRESPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DESA BIAK MULI KECAMATAN BAMBEL KABUPATEN ACEH TENGGARA)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul di atas benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya, yang disebutkan sumbernya. Dengan surat ini diperbuat dengan sebenar- benarnya, saya menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan,07Februari 2021

SANDIKA

231153054

**KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENYUSUN DAN MENETAPKAN ANGGARAN
DESA MENURUT UNDANG- UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM
PRESPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DESA BIAK MULI KECAMATAN BAMBEL
KABUPATEN ACEH TENGGARA)**

OLEH:

SANDIKA

23153054

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Fatimah, S.Ag MA

NIP. 1971032019970332 003

Adlin Budhiawan, SH,

NIP.19820510 200901 2 014

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Fatimah, S.Ag MA

NIP.1971032019970332 003

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul : Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara) telah dimunaqasyahkan pada tanggal 30 september 2020 dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Siyasah.

Medan, 06 Februari 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syari'ah UIN-SU Medan

Ketua

Sekretaris

Fatimah, S.Ag.MA

Zaid Alfauza Marpaung M.H

NIP.1971032019970332 003

NIP. 19880824201503 1 004

Anggota-anggota

Dr.Syafuruddin Syam,M.Ag

Adlin Budhiawan, SH, M.Hum

NIP.19750531200710 1 001

NIP. 19820510 200901 2 014

Irwansyah, MH

NIP. 19801011201411 1 002

Mengetahui ,
Dekan Fakultas Syari'ah UIN
Sumatera Utara

Dr.Zulham, M.Hum

NIP.19770321200901 1 008

IKHTISAR

Sandika, 23153054, judul :KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENETAPKAN ANGGARAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM PRESPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DESA BIAK MULI KECAMATAN BAMBEL KABUPATEN ACEH TENGGARA) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kewenangan penetapan dana desa oleh kepala desa biak muli, serta untuk mengetahui wewenang kepala desa dalam menyusun anggaran desa menurut undang-undang no 6 tahun 2014, serta untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap sikap seorang pemimpin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan studi lapangan (*feld research*), yang bersifat deskriptif dengan cara memperoleh data-data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis permasalahan dapat ditarik kesimpulan bahwa, adanya peraturan tentang kewenangan seorang kepala desa mengharuskan kepala desa tersebut untuk dapat mengatur masyarakat yang di pimpinnya menjadi dan tidak hanya memprioritaskan kepentingan pribadi, agar tidak terjadi kesenjangan antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Kata kunci :Kewenangan, Undang-undang, Fiqh siyasah

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Diantara salahsatu kesempurnaan-Nya adalah Dia karuniakan manusia pikiran dan kecerdasan. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepada Arwah Nabi kita Muhammad Saw, para sahabat dan umatnya yang selalu berpegang teguh hinggaakhir zaman.

Dalam memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Maka penulis menyusun skripsi dengan Judul **KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENYUSUN DAN MENETAPKAN ANGGARAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM PRESPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DESA BIAK MULI KEC.BAMBEL KAB.ACEH TENGGARA)**

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis betul-betul menyadari adanya rintangan dan ujian, namun pada akhirnya selalu ada jalan kemudahan,

tentunya tidak terlepas dari beberapa individu yang sepanjang penulisan skripsi ini banyak membantu dalam memberikan bimbingan dan masukan yang berharga kepada penulis guna menyempurnakan skripsi ini.

Dengan demikian dalam kesempatan yang berharga ini, penulis ingin mengungkapkan rasa hormat dan terimakasih tiada terhingga terutama kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara **Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag.**
2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, **Zulham M.Hum**, Selaku Dekan dan Segenap Jajaran Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibunda **Fatimah S.Ag, MA** selaku ketua jurusan Siyasah dan Bapak **Zaid Alfauza Marpaung M.H.** selaku sekretaris jurusan yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. **Ayah (Iskandar MudaS.HI) dan Ibu (Sakdiah)** tercinta yang selalu memberikan motivasi, nasehat, dukungan dan do'a yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya.
5. Kedua dosen pembimbing **Fatimah S.Ag, MA** dan **Adlin Budhiawan, SH, M.Hum** yang dengan sabar dalam memberikan arahan dan masukan yang amat bermanfaat kepada penulis hingga selesainya skripsi ini,

tiada kata yang pantas selain ucapan dan terima kasih dan do'a semoga Allah Swt membalasnya.

6. Terimakasih juga kepada alm. **Drs. H. Syu'aibun, M.Hum** yang pada masa hidupnya beliau sudah mencurahkan ilmu dan pemikirannya terhadap skripsi ini , semoga beliau di tempatkan di tempat yang Paling mulia disisi-Nya.
7. Keluarga besar saya ,serta orang terkasih saya, **Farid Chatami Amd,RO** adik-adik saya **Indah, Raja, dan Malia** serta Nenek saya **Ramine**, dan Paman saya **Muhadi Khalidi S.H ,M.Ag** yang selalu ada bersama penulis dan tidak bosannya memberikan motivasi dan arahan serta dukungan yang tiada henti-hentinya hingga penyusunan skripsi ini selesai.
8. Kepada saudara/i teman-teman seperjuangan penulis yaitu kelas Siyasah B yang saling memberikan motivasi mulai dari awal perkuliahan sampai selesainya studi perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.
9. Dan terimakasih juga kepada kakak terbaik kk **elvi junisa SH. M.A** yang telah membantu dala proses pengerjaan skripsi ini

Dan kepada seluruh pihak yang terkait yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan yang selalu ada bersama penulis mulai dari awal penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya serta menjadi amal baik di sisi Allah Swt. *Aamiinyaa Rabbal Aalamiin.*

Medan 06 juni 2020

SANDIKA

2315305

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Identifikasi Masalah.....	6
Batasan Masalah	7
Rumusan Masalah	7
Tujuan Penelitian	7
Kegunaan Penelitian	8
Kerangka Pemikiran	8
Hipotesa	9
Metode Penelitian.....	11
Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
A. Pengertian Kewenangan	16
B. Desa dan Kepala Desa	17
C. Konsep Good Governance	24
D. Mekanisme Penyusunan Anggaran Desa.....	25

E. Konsep Kepemimpinan dalam Islam	32
F. Konsep pemimpin dalam Mengelola Keuangan Negara (Siyasah Maliyah).....	42
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	51
A. Letak Geografis Kabupaten Aceh Tenggara.....	51
B. Letak Geografis Desa Biak Muli.....	52
C. Keadaan Demografis	53
D. Jumlah Penduduk	54
E. Adat, Agama dan Budaya.....	54
F. Pendidikan	56
G. Mata Pencaharian Penduduk.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	58
A. Kepala Desa dalam menyusun dan menetapkan anggaran desa di desa biak muli.....	58
B. Faktor-faktor pendukung serta penghambat Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa di desa biak muli kecamatan Babel, kabupaten Aceh Tenggara	67
C. Prespektif fiqh siyasah terhadap Prioritas Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa	68
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-undan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Desa Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kepala desa adalah pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang di tetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pada pasal angka 3 disebutkan bahwa

pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Adapun tugas kepala Desa menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa dalam Pasal 26 ayat (1) yaitu kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan memberdayakan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pada Pasal (2) Kepala Desa berwenang yaitu: Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, memanfaatkan teknologi tepat guna serta mengkordinasikan pembangunan desa secara partisipatif dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada point wewenang seorang kepala Desa salah satunya yaitu menetapkan anggaran Desa , dimana seorang kepala Desa dituntut

untuk menetapkan penyaluran Dana desa sesuai dengan kebutuhan desa demi untuk mensejahterakan masyarakat Desa sehingga tercapainya keadilan di dalam masyarakat desa tersebut.

Dalam struktur organisasi, peran seorang pemimpin tidak ada artinya tanpa dukungan rakyatnya. Hubungan antara pemimpin dan rakyat merupakan hal yang mutlak karena keduanya saling membutuhkan dan saling melengkapi. Hubungan antara pemimpin dan rakyat dapat pula digambarkan sebagai hubungan patronclient (patronase), yaitu hubungan antara bapak dan anak. Bapak (pemimpin) berkewajiban melindungi anak-anaknya, sedangkan anak-anak harus patuh kepada bapaknya sebagai pemimpin.

Menurut al-Mawardi, yang dimaksud seorang pemimpin adalah apabila seorang imam melaksanakan hak-hak rakyatnya dengan penuh keadilan. Keadilan harus dipegang pemimpin, hal ini disebabkan pemimpin sebagaimana yang dikenal dalam Islam adalah seorang Khalifah yang mengatur ummat sebagai pengganti Rasulullah Saw Dalam menegakkan agama dan mengatur dunia dengan agama itu , menurut imam al-mawardi kata imamah atau pemimpin yaitu :

الإِمَامَةُ: مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النَّبِيِّ فِي جَرِاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا

“Imamah (kepemimpinan/kekuasaan/pemerintahan) dilembagakan untuk menggantikan (tugas) kenabian guna melindungi agama dan mengatur dunia”.

Menurut al-Zamakhshari dan al-Qurthubi, Abd Muis Sali

menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus melaksanakan amanat yang telah diberikan kepadanya dan sebaliknya rakyat harus taat kepada pemimpinnya.¹ Peraturan menteri Desa Nomor 6 tahun 2020 perubahan atas Peraturan menteri desa Nomor 11 tahun 2019 , dalam pasal 1 angka 2 tentang Desa menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan UU No 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Desa Biak Muli adalah sebuah Desa terletak di kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara , dimana desa tersebut merupakan salah satu desa yang ibu kota kecamatannya yaitu Kuta Lang-Lang, secara geografis desa Biak Muli memiliki batas-batas dengan desa lain yaitu sebelah utara dengan

¹ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h.191.

desa kute seri, sebelah barat dengan desa bembel gabungan, sebelah selatan berbatas dengan desa kuta buluh, dan sebelah timur berbatas dengan pulo perengge.

Secara demografi jumlah penduduk di desa biak muli sebanyak 1000 jiwa, yang terdiri dari beberapa suku, aceh, alas, batak, pak-pak. Seorang kepala desa dituntut untuk dapat menjalankan pemerintahan yang baik di sebuah desa yang di pimpinya, setelah peneliti melakukan observasi di desa biak muli, peneliti menemukan beberapa infrastruktur yang belum bagus, seperti lampu penerangan dan rumah ibadah yang kurang memadai, dengan hal tersebut peneliti ingin menganalisa tentang penetapan dan perencanaan anggaran di desa biak muli di prioritaskan kemana , peneliti tidak menemukan pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat desa tersebut.

Seorang Kepala Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan. Disamping itu kepala desa mengemban fungsinya antara lain: menggerakkan partisipasi masyarakat, kegiatan dalam rumah tangganya sendiri, melaksanakan tugas dari pemerintahan diatasnya,keamanandan ketertiban masyarakatnya, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pemerintah diatasnya. Agar tercapai dan terlaksana dengan baik maka bagi

seorang Kepala Desa harus memiliki gaya tersendiri agar masyarakat ikut serta membantu kelancaran dari pembangunan. Bagi seorang pemimpin harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan tidak terlalu memaksakan kemauan sendiri.

Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan salah satu anggota masyarakat, menurut beliau anggaran desa yang direncanakan kurang tepat sasaran, beliau melihat pembangunan infrastruktur kurang di prioritaskan oleh aparat desa.² Dalam hal mencapai kesejahteraan masyarakat desa keikutsertaan masyarakat Desa Biak Muli dalam menyukseskan program pembangunan sangat diharapkan, dengan keterlibatan masyarakat secara aktif dan penuh tanggung jawab dalam pembangunan desa keharmonisan yang dicita-citakan dapat tercapai. Oleh karena permasalahan-permasalahan di atas maka penulis tertarik meneliti bagaimana kewenangan kepala desa dalam menyusun dan menetapkan anggaran desa apakah sudah terealisasi dengan baik ?

Oleh karena hal itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul : Kewenangan Kepala Desa dalam Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara).

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah Menurut

² Burhan, anggota masyarakat, wawancara pribadi 4 april 2020

observasi yang peneliti lakukan infrastruktur di desa Biak muli tidak memadai, seperti kurangnya penerangan di sekitaran jalan desa, sehingga pada malam hari aktifitas masyarakat terhambat. Kurangnya tempat ibadah dan kebanyakan orang di desa tersebut kegiatannya berkebun, namun jalan menuju ke tempat kebun mereka masih tanah yang kalau hujan akan becek dan menghambat kegiatan masyarakat.

C. Batasan Masalah

Melihat dari latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran di Desa, dan faktor-faktor pendukung serta penghambat Kepala Desa dalam Menetapkan Anggaran Desa di desa biak muli kecamatan Babel kabupaten aceh tenggara, dan bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap Prioritas Kepala Desa dalam Menetapkan Anggaran Desa .

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kewenangan Kepala Desa dalam Menetapkan Anggaran di Desa Biak Muli kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara ?
2. Apa faktor-faktor pendukung serta penghambat Kepala Desa dalam Menetapkan Anggaran Desa di desa biak muli kecamatan Babel kabupaten Aceh tenggara ?

3. Bagaimana prespektif fiqh siyasah terhadap Prioritas Kepala Desa dalam Menetapkan Anggaran Desa ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan kepala desa dalam menetapkan anggaran.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat kepala desa dalam menetapkan anggaran desa.
3. Untuk mengetahui prespektif fiqh siyasah terhadap Kewenangan Kepala Desa dalam Menetapkan Anggaran Desa.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis yaitu berbagi ilmu pengetahuan kepada para pembaca tentang prioritas kepala desa dalam penetapan anggaran desa.
2. Kegunaan secara praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah

G. Kerangka pemikiran

Kepala desa adalah pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Seorang pemimpin adalah juga seorang dalam suatu perkumpulan yang diharapkan menggunakan pengaruhnya dalam mewujudkan dan mencapai tujuan kelompok. Pemimpin yang jujur ialah seorang yang memimpin dan bukan seorang yang menggunakan kedudukannya untuk memimpin .

Selain itu dengan kemampuan kepemimpinan akan memungkinkan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya agar mereka mau menjalankan segala tugas dan tanggung jawab dengan jujur, amanah, ikhlas, dan profesional. Setiap pemimpin mempunyai cara atau gaya dalam memimpin organisasinya. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara pemimpin untuk memengaruhi bawahannya. Secara relatif ada tiga macam gaya kepemimpinan yang berbeda, yaitu otokrasi, demokratis, atau partisipatif, dan laissez-faire, yang semuanya pasti mempunyai kelemahan-kelemahan dan keunggulannya.

Perbedaan gaya kepemimpinan dalam organisasi akan mempunyai pengaruh yang berbeda pula pada partisipasi individu dan perilaku kelompok. Kepemimpinan pada dasarnya merupakan amanah, yang mana seorang pemimpin harus bertanggung jawab kepada yang dipimpinnya. Seorang hendaknya membiasakan diri

berlaku adil, baik terhadap dirinya, kedua orang tuanya. saudara-saudaranya, anak-anaknya, teman-temannya, tetangganya, masyarakatnya, bangsa dan negaranya, maupun terhadap sang khalik (Allah swt). Apabila keadilan itu ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan, tentu keamanan, ketentraman, kedamaian, serta kesejahteraan lahir dan batin, duniawi dan akhirat akan dapat diraih.

H. Hipotesa

Dalam sebuah penelitian hipotesa merupakan jawaban sementara yang dianggap benar dalam masalah yang dibahas dalam sebuah penelitian. Hipotesa dapat menjaga pegangan untuk lebih teraturnya pembahasan dan penganalisaan dalam penelitian ini, sehingga tujuan yang diharapkan dapat dicapai.

Salah satu kewajiban pemimpin menurut imam al-mawardi adalah mensejahterakan masyarakatnya secara keseluruhan, Hubungan antara pemimpin dan rakyat merupakan hal yang mutlak karena keduanya saling membutuhkan dan saling melengkapi. Hubungan antara pemimpin dan rakyat dapat pula digambarkan sebagai hubungan patroncilent (patronase), yaitu hubungan antara bapak dan anak. Bapak (pemimpin) berkewajiban melindungi anak-anaknya, sedangkan anak-anak harus patuh kepada bapaknya sebagai pemimpin.

Akan tetapi penulis melihat kurangnya pemerataan pembangunan dikarenakan dalam hal penyusunan dan penetapan

perencanaan anggaran desa belum sepenuhnya tepat sasaran, semestinya prioritas utama penyusunan dan penetapan anggaran desa untuk kesejahteraan masyarakat desa dan untuk kebutuhan desa. Dan juga kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya kepada perangkat desa, sehingga terjadinya kesenjangan antara kepala desa dengan masyarakat dan mengakibatkan terhambatnya program-program yang sudah dirancang.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.³ Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu metode yang digunakan dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggambarkan secara terperinci fenomena-fenomena tertentu dan kemudian menganalisisnya, serta menginterpretasikan melalui data yang terkumpul.⁴ Dengan memilih metode kualitatif ini, penulis mengharapkan

³www.statistikian.com diakses pada tanggal 9 oktober 2020

⁴Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Reneka Cipta, 2012), h.24.

dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya⁵. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Dimana semata-mata melukiskan keadaan objek atau menjelaskan atau menerangkan suatu peristiwa, dimana peneliti memberikan gambaran tentang kewenangan kepala desa dalam menetapkan anggaran Desa menurut Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa prespektif Fiqh siyasah (studi kasus di desa biak muli kecamatan bambel kabupaten aceh tenggara).

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian pada Skripsi ini yaitu desa biak muli kecamatan bambel kabupaten aceh tenggara .

4. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan maka penulis menggunakan jenis penelitian diantaranya yaitu field research

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), h.10.

(penelitian lapangan) penulis mengadakan penelitian dengan datang langsung ke tempat penelitiannya yaitu desa biak muli agar memperoleh data yang lengkap dan akurat. Sumber data dari penelitian ini akan diperoleh melalui

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari Kepala Desa, perangkat desa, masyarakat dan Undang-Undang tentang Desa.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui dari pencatatan, dari Kantor Kepala Desa serta pemimpin informal yang diambil dari pemimpin Kadus dan lembaga-lembaga lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, serta buku-buku penunjang penelitian.

5. Subjek dan Objek Penelitian

Menjadi subjek penelitian adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa, pimpinan informal yang diambil dari tokoh masyarakat. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah kewenangan kepala desa dalam penyusunan dan penetapan anggaran desa perspektif fiqh siyasah (studi kasus di desa biak muli kecamatan bambel kabupaten aceh tenggara)

6. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan

secara langsung kelapangan, khususnya dalam masalah kepemimpinan Kepala Desa biak muli kecamatan bambel aceh teggara.

- b. Wawancara, yaitu wawancara diarahkan kepada responden yang terdiri dari Kepala Desa, dan sekretaris desa, dan Masyarakat.

J. Sistematika Penulisan

Sebagai rincian mengenai penulisan ini, penulis nantinya akan menyusun hasil penelitian secara sistematis dalam bentuk skripsi dengan membagi kepada 5 (lima) bab. Dan dari lima bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan tersebut sebagai berikut:

BAB I	Pada bab ini dijelaskan mengenai Pendahuluan, di dalam pendahuluan ini penulis memaparkan. Latar Belakang Masalah, Identifikasi masalah, batasan masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Hipotesa, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
BAB II	Pada bab ini berisikan tentang Landasan Teoritis, yang berisi tentang pengertian kewenangan, pengertian desa dan kepala desa, tugas dan fungsi kepala desa, wewenang kepala desa, hak dan kewajiban kepala desa, mekanisme penyusunan dan penetapan

	<p>anggaran desa, konsep kepemimpinan dalam islam, kepemimpinan, tugas dan fungsi pemimpin, wewenang pemimpin, hak dan kewajiban pemimpin, dan pengertian anggaran desa, Konsep Pemimpin Dalam Mengelola Keuangan Negara Dalam Islam (Siyasah Maliyah).</p>
BAB III	<p>Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian, penulis mengungkapkan mengenai desa biak muli kecamatan Babel kabupaten Aceh Tenggara.</p>
BAB IV	<p>Hasil Penelitian. Pada bab ini penulis mengungkapkan mengenai prioritas Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Biak Muli, mengenai faktor-faktor penghambat dan penunjang Kepala Desa dalam Menetapkan Anggaran Desa di desa biak muli kecamatan Babel ,kabupaten Aceh tenggara dan juga mengenai perspektif fiqh siyasah terhadap kewenangan Kepala Desa dalam Menetapkan Anggaran Desa.</p>
BAB V	<p>Penutup. Pada bab ini, penulis membahas beberapa kesimpulan dan saran-saran yang penulis anggap perlu bagi Kepala Desa biak muli dan masyarakatnya</p>

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kewenangan (wewenang)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia wewenang merupakan hak dan kekuasaan untuk bertindak, hak untuk berbuat keputusan, dan hak untuk memerintah. Menurut Frans Magnis Suseno kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan. Menurut H.D Stoud kewewenangan

adalah keseluruhan aturan-aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik. Menurut Nomensen Sinamo, kewenangan yang dimaksud H.D Stoud ini adalah kewenangan yang dilimpahkan kepada instansi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan).

Sementara itu menurut S.F Marbun wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Sedangkan dalam Black Law Dictionary kewenangan diartikan lebih luas, tidak hanya melakukan praktek kekuasaan, tetapi kewenangan juga diartikan dalam konteks menerapkan dan menegakan hukum, adanya ketaatan yang pasti, mengandung perintah, memutuskan, adanya pengawasan yuridiksi bahkan kewenangan dikaitkan dengan kewibawaan, kharisma bahkan kekuatan fisik. Wewenang merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara. sebab didalam wewenang tersebut mengandung hak dan kewajiban, bahkan di dalam hukum tata negara wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtskracht*). Artinya hanya tindakan yang sah (berdasarkan wewenang) yang mendapat kekuasaan hukum (*rechtskracht*). Sementara itu menurut Bagir Manan

sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR mengatakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas maka menurut penulis pengertian kewenangan adalah, kemampuan untuk bertindak berdasarkan kekuasaan yang sah. Dikatakan kemampuan untuk bertindak sebab, kata bertindak mengandung arti berbuat, beraksi, berlaku, perbuatan, tindakan, dan langkah yang menunjukan suatu kemampuan. Kemampuan itu harus didasarkan atas kekuasaan yang sah. Hukumlah yang melegitimasi kekuasaan, sehingga dikatakan sah. Sehingga kewenangan lahir karena kekuasaan yang sah menurut hukum. Suatu tindakan pejabat publik dikatakan tidak sah (sewenang-wenang) jika tidak berdasar atas hukum. Perlu di pahami bahwa, antara kekuasaan dan kewenangan saling berkaitan namun tidak mempunyai arti yang sama.⁶

B. Desa dan Kepala Desa

Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri.⁷ Desa di Indonesia pada hakekatnya

⁶ <https://agusroniarbaben.wordpress.com/2017/06/03/pengertian-kewenangan-sumber-sumber-kewenangan-dan-kewenangan-membentuk-undang-undang/> diunduh pada 14 agustus 2020 pukul 08.00 wib

⁷Tim Penyusun Kamus Besar Pembinaan Dan Pembangunan Bahasa (P3B) Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan .Ke VII, Edisi Ke-2, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), h.192.

merupakan kesatuan masyarakat hukum asli, dengan berlandaskan pada aturan hukum adat. Oleh karenanya pemerintahan desa yang lahir dari sistem hukum yang berlaku bersifat demokratis sesuai dengan filosofi terbentuknya desa dan diharapkan pemerintah desa dapat menjalankan tiga peranan utamanya yaitu: sebagai struktur perantara, sebagai pelayan masyarakat, dan sebagai agen pembaharuan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut, Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir dan batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota.

Pimpinan yang berwenang dalam pemerintahan desa ialah Kepala Desa atau dengan istilah adat dengan sebutan Lurah, Kuwu, Bekel, Petinggi (Jawa Tengah) Mandor, Lembur, Kekolot (Jawa Barat, Banten) Kejuron, Pengulu Suku, Keucik, Pentua (Gayo, Alas, Aceh) Pengulu Andiko (Sumatera Barat) Penyimbang, Kepala Marga (Sumatera Selatan) Orang Kaya, Kepala Desa (Hitu, Ambon) Raja Penusunan (Sekitar Danau Toba) Kesair Pengulu (Karo Batak) Parek, Klian (Bali) Marsaoleh (Gorontalo) Komelaho (Kalimantan Selatan).⁸ Bayu Suriningrat berpendapat, Kepala Desa adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa, bersama-sama dengan pembantunya dan ia merupakan pamong desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, disamping itu dia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan.⁹

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, kepala desa adalah pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Kepala desa adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa ia mempunyai

⁸Saduwastiona, Irwan Tahir, *Adminitrasi Pemerintahan Desa*, (Jakarta : Universitas Terbuka, 2007), h.69.

⁹Suwani, *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur*, Istilah : *Jurnal Fisip*, *Adminitrasi Negara* 2016, h.2237.

peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa ia dibantu oleh pamong desa.

1. Tugas dan Fungsi kepala Desa

Tugas adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Tugas sebagai satu kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.¹⁰Sedangkan tugas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang.¹¹

Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengatur 4 (empat) tugas utama Kepala Desa yaitu: Menyelenggarakan pemerintahan desa, Melaksanakan pembangunan desa, Melaksanakan pembinaan masyarakat desa, dan Memberdayakan masyarakat desa. Adapun fungsi kepala desa

¹⁰ Muammar Himawan, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, (Jakarta : Bina Ilmu, 2004), h. 38.

¹¹ Tim Penyusun Kamus Besar Pembinaan Dan Pembangunan Bahasa (P3B) Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan. Ke VII, Edisi Ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 902.

adalah melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. Pada ayat (3) disebutkan, fungsi kepala desa lainnya adalah melakukan pemberdayaan masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan. Kepala desa juga berfungsi secara sosial ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna. Fungsi lainnya adalah membangun hubungan kemitraan dengan lembaga lainnya.

2. Wewenang Kepala Desa

Wewenang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBB) ialah hak kekuasaan untuk bertindak, kewenangan, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.¹²

Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kepala desa berwenang:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- 4) Menetapkan peraturan desa;
- 5) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- 6) Membina kehidupan masyarakat desa;

¹²*Ibid*, h. 987.

- 7) Membina ketenteraman dan ketertib an masyarakat desa;
- 8) Membina dan meningkatkan perokonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- 13) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- 14) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu derajat atau martabat.¹³Sedangkan kewajiban ialah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan dan keharusan. Kewajiban adalah sesuatu

¹³*Ibid*,h.298.

yang harus dilakukan dengan penuh dengan tanggung jawab serta tindakan yang harus diambil seseorang baik secara hukum maupun moral.¹⁴

Berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 6 tahun 2014 kepala desa berhak mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa, mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa, menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan, mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan dan memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Kepala desa berkewajiban antara lain:

1. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

¹⁴*Ibid*, h.421.

7. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; dan seterusnya.
9. Mengelola keuangan dan aset desa
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan
16. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

C. Konsep GoodGovernance

Dimensi good governance menurut World Bank sebagaimana disampaikan oleh Turner dan Hulme (1997) dalam bukunya yang berjudul "Governance, Administration and Development, Making The State work". World Bank mengidentifikasi empat kunci dimensi governance pada sektor publik, yaitu akuntabilitas (accountability), kerangka hukum untuk pembangunan (legal framework for development), informasi (information), dan transparansi

(transpiration).¹⁵

Konsepsi Tentang Anggaran-Anggaran menurut Rufus Wixon dalam Burhanuddin (1999) didefinisikan sebagai “suatu rencana yang disajikan secara kuantitatif yang biasanya dinyatakan dalam satuan uang yang disusun untuk periode yang akan datang”. Sementara Syamsi dalam Basri (2003) mendefinisikan, “anggaran adalah hasil perencanaan yang berkaitandengan bermacam- macam kegiatan secara terpadu yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu”.

Dalam penyusunan anggaran menurut Rinusu (2003), ada beberapa prinsip dasar yang harus diakomodir, yaitu:

a) Transaparan

Anggaran hendaknya dapat memberikan informasi tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Oleh karena itu, dalam setiap proses penganggaran harus dilakukan secara transparan.

b) Partisipatif

Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap proses penganggaran, demi menjamin adanya kesesuaian antara kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan peruntukan anggaran. Selain itu juga untuk memainkan peran kontrol masyarakat sehingga dapat mencegah dan menemukan praktek korupsi.

c) Disiplin

¹⁵www.books.google.co.i dunduh pada 26 oktober 2019

Penyusunan anggaran harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Disiplin penting untuk mencegah terjadinya pencampuradukan dan duplikasi anggaran disamping juga berkaitan dengan ketepatan waktu dalam pengimplementasian untuk menghindari kebocoran maupun pemborosan.

d) Keadilan

Pembiayaan pemerintah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dibebankan kepada segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil sehingga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

e) Efisiensi dan Efektivitas

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Untuk itu dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari setiap proyek yang diprogramkan.

f) Rasional dan Terukur

Dalam menyusun anggaran baik menyangkut sisi pendapatan maupun pengeluaran harus memperhatikan aspek rasionalitas

anggaran dan dapat diukur sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000, yaitu (1). Jumlah pendapatan yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan; (2). Jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.

D. Mekanisme Penyusunan dan Penetapan Anggaran Desa

1. Pengertian Perencanaan Keuangan

Secara umum, pengertian perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan Pengelolaan Keuangan Desa, perencanaan dimaksud adalah proses penyusunan APBDesa. Penyusunan APBDesa berdasar pada RKPDesa, yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Dengan demikian, APBDesa yang juga ditetapkan dengan Perdes, merupakan dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum.

Tahap I: Perencanaan (Lingkup Desa)



Diolah dari:

Permendagri No. 113/2014, Bab V Bagian Kesatu Perencanaan, Pasal 20

2. Fungsi APBDes

Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum, APBDesa menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait, untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, serta menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah yang tertentu yang pasti, untuk melaksanakan rencana kegiatan dimaksud. APBDesa menjamin kelayakan sebuah kegiatan dari segi pendanaan, sehingga dapat dipastikan kelayakan hasil kegiatan secara teknis.

3. Ketentuan Penyusunan APBDesa

Dalam menyusun APBDesa, ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi:

- APBDesa disusun berdasarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa
- APBDesa disusun untuk masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya.

- c. Rancangan APBDesa harus dibahas dan disepakati antara Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- d. APBDesa dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes, selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani. Selain itu, secara teknis penyusunan APBDesa juga harus memperhatikan:

4. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang ditetapkan dalam APBDes merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Rasional artinya menurut pikiran logis atau masuk akal serta sesuai fakta atau data.

5. Belanja Desa

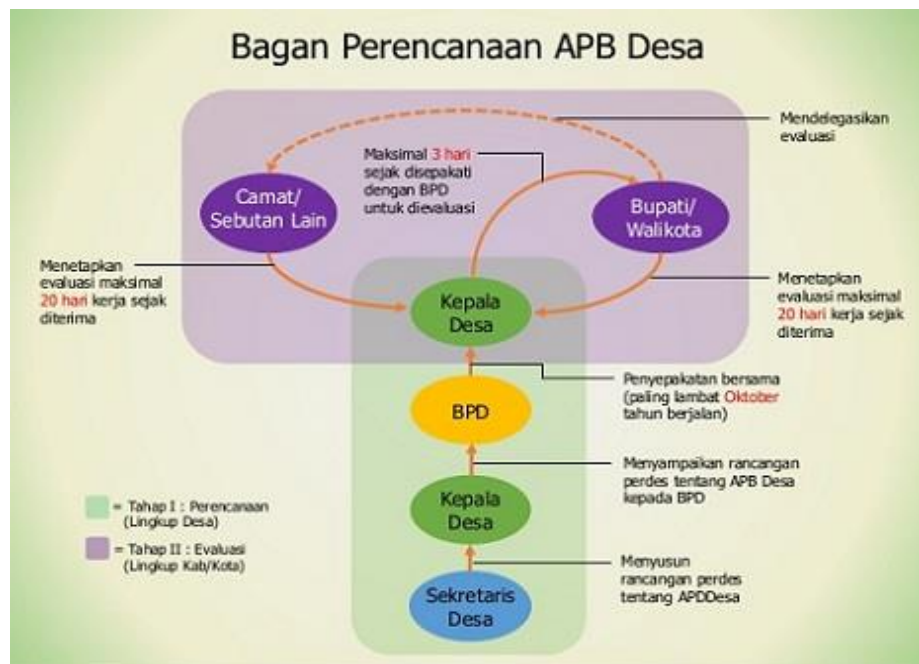
Belanja desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dan penggunaan keuangan desa harus konsisten (sesuai dengan rencana, tepat jumlah, dan tepat peruntukan), dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan nyata/sesungguhnya yang dimiliki desa, serta tidak membebani keuangan desa di tahun anggaran tertentu.

7. SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran)

Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada, yaitu potensi terjadinya pelampauan realisasi penerimaan desa, terjadinya penghematan belanja, dan adanya sisa dana yang masih mengendap dalam rekening kas desa yang belum dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran sebelumnya.



8. Pihak Pihak Yang Terlibat Dalam Penyusunan APB Desa

Pihak pihak yang terlibat dalam penyusunan APB Desa Partisipatif adalah sebagai berikut

- Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa)
- BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
- Perwakilan Warga (Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan, Unsur warga Miskin, Organisasi Kemasyarakatan)

- d. Bupati/Camat

9. Peran Para Pihak Yang Terlibat Dalam Penyusunan APB Desa

Masing masing pihak yang terlibat dalam penyusunan APB Desa Partisipatif mempunyai peran sendiri-sendiri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

10. Peran Kepala Desa

- a. Menyiapkan SK Tim Penyusun
- b. Membahas Raperdes APB Desa dan Ranperdes APB Desa Perubahan bersama BPD
- c. Menetapkan Perdes APB Desa dan Perdes APB Desa Perubahan
- d. Mensosialisasikan Perdes APB Desa, APB Desa Perubahan dan Perdes Pertanggung-jawaban APB Desa
- e. Menetapkan kebijakan pelaksanaan APB Desa
- f. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang desa
- g. Menerbitkan Keputusan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
- h. Menetapkan bendahara desa
- i. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- j. Menetapkan pengelolaan aset desa.

11. Peran Sekertaris Desa

- a) Memimpin penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
- b) Menyiapkan Ranperdes APB Desa, Ranperdes APB Desa Perubahan dan Ranperdes Pertanggungjawaban APB Desa.
- c) Memeriksa dan merekomendasi RAB yang diusulkan oleh pelaksana.
- d) Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa terkait Pelaksanaan Perdes APB Desa dan APB Desa Perubahan.
- e) Mendokumentasikan proses penyusunan APB Desa, APB Desa Perubahan, dan Pertanggungjawaban APB Desa.
- f) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

12. Peran BPD

- a) Membahas Raperdes APB Desa dan APB Desa Perubahan bersama Kades dalam rangka memperoleh persetujuan bersama (Pembahasan menitikberatkan pada kesesuaian RAPBDesa dengan RKP Desa).
- b) Menyetujui dan menetapkan APB Desa dan APB Desa Perubahan bersama Kepala Desa.
- c) Mengawasi Proses Penyusunan dan Implementasi APB Desa.

13. Peran Masyarakat

- a) Konsolidasi partisipan yang terlibat dalam proses.
- b) gregasi kepentingan (mengumpulkan kepentingan yang berbeda beda).
- c) Memilih preferensi (prioritas) program dan kegiatan.
- d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perdes APB Desa.

- e) Terlibat dalam penyusunan RKA (sesuai tema kegiatan).

14. Peran Bupati

- a) Melakukan Evaluasi
- b) Melakukan Pembinaan
- c) Melakukan Pengawasan
- d) Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bupati melimpahkan tugas kepada Camat dan satuan kerja perangkat daerah yang mengampu pemberdayaan desa.

E. Konsep Kepemimpinan dalam Islam

1) Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah masalah relasi dan pengaruh antarapemimpin dan yang dipimpin. Kepemimpinan tersebut muncul dan berkembang sebagai hasil dari interaksi otomatis di antara pemimpin dan individu-individu yang dipimpin (ada relasi *inter-personal*).

Istilah Kepemimpinan dalam Islam ada beberapa bentuk, yaitu khilafah, *imamah*, *imarah*, *wilayah*, *sultan*, *mulk* dan *ri'asah*. Setiap istilah ini mengandung arti kepemimpinan secara umum. Namun istilah yang sering digunakan dalam konteks kepemimpinan pemerintahan dan kenegaraan, yaitu Khilafah, imamah dan imarah.¹⁶Oleh karena itu, pembahasan kepemimpinan dalam Islam akan diwakili oleh ketiga istilah ini.

¹⁶Ketigaistilahinimerupakanbentukkatayangmenyatakanperihaldalammemimpin, sedangkanbentukkatayangmenunjukpadapelakunyaadalah*khilafah*,*imam*dan*amr*.

a. Khilafah

Kata *khilafah* berasal dari kata *khalafa-yakhlifu-khalfun* yang berarti- 'aud atau *al-balad* yakni mengganti, yang pada mulanya berarti belakang. Adapun pelakunya yaitu orang yang mengganti disebut khalifah dengan bentuk jamak *khulafa'* yang berarti wakil, pengganti dan penguasa.¹⁷Kata *khalifah* sering diartikan sebagai pengganti, karena orang yang menggantikan datang sesudah orang yang digantikan dan ia menempati tempat dan kedudukan orang tersebut.

Khalifah juga bisa berarti seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang memberi wewenang. Menurut Ragib al-Asfahani, arti, menggantikan yang lain yang dikandung kata *khalifah* berarti melaksanakan sesuatu atas nama yang digantikan, baik orang yang digantikannya itu bersamanya atau tidak.

b. Imamah

Imamah berasal dari kata *amma-yaummu-ammun* yang berarti *alqasdu* yaitu sengaja, *al-taqaddum* yaitu berada di depan atau mendahului, juga bisa berarti menjadi imam atau pemimpin (memimpin). Imamah di sini berarti perihal memimpin. Sedangkan

¹⁷Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamental* (Magelang: Indonesiatara, 2001), h. 30.

kata imam merupakan bentuk ism fa'il yang berarti setiap orang yang memimpin suatu kaum menuju jalan yang lurus ataupun sesat. Bentuk jamak dari kata imam adalah a'immah.¹⁸

Imam juga berarti bangunan benang yang diletakkan di atas bangunan, ketika membangun, untuk memelihara kelurusannya. Dalam al-Qur'an, kata imam dapat berarti orang yang memimpin suatu kaum yang berada di jalan lurus, seperti dalam surat al-Furqan, ayat 74 yang artinya: "Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa".

Selain itu dalam surat al-Baqarah ayat 124 dijelaskan sebagai berikut: "Artinya: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim".

Kata ini juga bisa berarti orang yang memimpin di jalan kesesatan, seperti yang ditunjukkan dalam surat al-Qasas, ayat 41 Allah menjelaskan sebagai berikut: "Artinya: Dan Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin

¹⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: t.p, 1984), h. 42-44.

yang menyeru(manusia) keneraka dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong”.

Namun lepas dari semua arti ini, secara umum dapat dikatakan bahwa imam adalah seorang yang dapat dijadikan teladan yang di atas pundaknya terletak tanggung jawab untuk meneruskan misi Nabi SAW. dalam menjaga agama dan mengelola serta mengatur urusan negara.¹⁹

c. Imarah

Imarah berasal dari kata *amara-ya'muru-amrun* yang berarti memerintah, lawan kata dari melarang. Pelakunya disebut amir yang berarti pangeran, putra mahkota, raja (*al-malik*), kepala atau pemimpin (*al-ra'is*), penguasa (*wali*). Selain itu juga bisa berarti penuntun atau penunjuk orang buta, dan tetangga. Adapun bentuk jamaknya adalah *Umara'*.²⁰

Kata *amara* muncul berkali-kali dalam al-Qur'an dan naskah-naskah awal lainnya dalam pengertian wewenang' dan perintah seseorang yang memegang komando atau menduduki suatu jabatan dengan wewenang tertentu disebut *sahib al-amr*, sedangkan pemegang *amr* tertinggi adalah *amir*. Pada masa-masa akhir abad pertengahan, kata sifat *amiri* sering digunakan dalam pengertian hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan atau administrasi.

¹⁹Taufiq Rahman, *Moralitas Pemimpin dalam Perspektif al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia,1999), h.42.

²⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*,(Yogyakarta:t.p,1984),h.41-42.

2) Tugas dan Fungsi Pemimpin

Al-Mawardi mengatakan bahwa pada umumnya, tugas pemimpin islam adalah menjaga kepentingan agama, urusan negara, dan umat. Al-Mawardi memang menekankan pada pemerintah untuk menjaga urusan agama. Baik dari aqidah, ibadah, muamalah, hingga akhlak dan budi pekerti masyarakatlah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, karena ini merupakan hal yang sangat penting. Bukan hanya masalah sandang, pangan dan papan sebagai hal yang penting, namun permasalahan agama tersebut lebih penting. jangan sampai berat sebelah, sehingga menciptakan kehidupan yang tidak seimbang seperti yang disebutkan di atas. Al-Mawardi mengenai tugas seorang khalifah negara yang dalam penjelasannya merinci masalah-masalah umum yang menjadi kekuasaan seorang khalifah ada sepuluh macam, antara lain:²¹Pertama, menjaga prinsip-prinsip agama (*hifzu ad-din*) yang sudah tetap dan telah menjadi konsensus umat terdahulu.

Kekuasaan inilah yang membedakan kepala negara Islam dengan kepala negara manapun dari negara demokrasi di dunia ini, yang semata-mata hanya memimpin masalah-masalah duniawi. Khalifah sebagai kepala negara berkewajiban melindungi agama dari segala gangguan. Bukan hanya terhadap agama Islam yang menjadi asas

²¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah (Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam)*, terj. Fadhli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2000), h. 23-24.

negara, tetapi semua agama yang dianut rakyat harus mendapat perlindungan yang sama. Perlindungan dalam tingkatan pasif adalah memberi kebebasan bagi agama-agama itu untuk hidup dan berkembang dengan sebaik-baiknya. Dan dalam sifat aktif adalah memberi bantuan moril dan materil.

Bahkan sebagai kelanjutannya, negara dapat mendirikan kementrian agama yang khusus mengurus masalah-masalah agama. Kedua, mengepalai kekuasaan pemerintahan (*tanfizu al-Ahkam*). Dengan kekuasaan ini kepala negara adalah merupakan intansi tertinggi dan kekuasaan eksekutif yang menjalankan pemerintahan. Menerapkan hukum di antara orang-orang yang bersengketa dan menengahi pihak yang bertetangan, sehingga keadilan dapat berjalan dan pihak yang dzali tidak berani melanggar serta yang teraniaya tidak menjadi lemah. Ketiga, melindungi berjalannya hukum dan Undang-Undang (*Himayatu al- Baidha*). Hal ini dimaksudkan untuk melindungi seluruh hak-hal rakyat yang harus dihormati, sehingga rakyat bebas meredaka mencari penghidupannya dan menjaga kewibawaan pemerintah sehingga dapat mengatur kehidupan umat, membuat suasana aman, tertib serta menjamin keselamatan jiwa dan harta benda. Keempat, menetapkan Undang-Undang (*Iqamatul al-Hudud*), salah satunya dengan menegakan supremasi hukum, agar dapat memelihara hukum-hukum Allah dari usaha-usaha pelanggaran dan menjaga hak-hak umat dari tindakan perusakan dan destruktif.

Kekuasaan ini adalah kekuasaan legislatif dalam negara demokrasi. Kepala negara melaksanakannya dengan bantuan dari parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat). Kelima, mengepalai seluruh angkatan perang (*Tahzhinu as-Tsugur*), mencegah timbulnya kerusuhan-kerusuhan di tengah masyarakat dengan kekuatan, sehingga tidak sampai ada permusuhan (*Agresi*) terhadap kehormatan atau sampai menumpahkan darah seorang muslim atau non Muslim yang tunduk pada ketentuan Islam. Keenam, menyatakan keadaan perang atau bahaya (*Jihadu man'anad*), kalau negara terancam bahaya dari luar karena serbuan musuh atau dari dalam karena perbuatan pengacau, maka kepala negara mempunyai hak untuk mengumumkan perang atau keadaan bahaya.

Tapi menurut Imam Al-Mawardi yang dimaksud perang disini perang dalam arti sempit yaitu jihad melawan musuh Islam setelah lebih dahulu diajak untuk masuk atau menjadi orang yang berada di bawah perlindungan Islam guna melaksanakan perintah Allah, menjadikan Islam menang di atas agama-agama lain. Ketujuh, mengawasi pemungutan iuran negara (*Jibayatu al-fai wa ash-Shadaqah*), menjaga hasil rampasan perang dan shadaqah sesuai dengan ketentuan syari'at baik berupa nash atau jihad dengan tanpa rasa takut.

Menurut pendapat Imam al-Mawardi adalah supaya jangan dibebankan kepada rakyat tentang pembayaran pajak dan iuran yang

memberatkan mereka, sehingga pemungutan negara harus bebas dari segala ketakutan dan paksaan. Kedelapan, memberikan anugerah dan pangkat kehormatan (*Taqdiru al-Athaya*), menetapkan jumlah hadiah yang dikeluarkan oleh Baitul Mal dengan cara tidak boros dan tidak kikir dan diserahkan tepat pada waktunya. Imam Mawardi memandangnya sebagai hak yang luas biasa yang hanya boleh digunakan kepala negara dengan sangat hati-hati tidak boleh secara royal dan keterlaluan, sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Kesembilan, mengangkat pegawai-pegawai sipil dan militer (*Istikfau al-umana*), mencari orang-orang yang jujur dan amanat dalam menjalankan tugas-tugas dan pengaturan harta yang dipercayakan kepada mereka, agar pekerjaan-pekerjaan tersebut ditangani secara profesional dan harta kekayaan dipegang oleh orang-orang yang benar-benar jujur.

Kesepuluh, mencampuri pemerintahan (*Mubasyaratu al-umuri binafsih*) selalu memperhatikan dan mengikuti perkembangan serta segala problemnya agar dapat dijadikan pegangan umat dengan baik dan memelihara agama. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Shaad ayat 26 yang artinya : Hai Daud sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat,

karena mereka melupakan hari perhitungan'.

Kepemimpinan ini bisa berfungsi atas dasar kekuasaan pemimpin untuk mengajak, mempengaruhi dan menggerakkan orang lain guna melakukan sesuatu demi pencapaian satu tujuan tertentu. Dengan demikian, pemimpin tersebut ada apabila terdapat satu kelompok atau satu organisasi.²²

Wewenang PemimpinSeorang khalifah atau kepala negara secara formal memperoleh wewenang dan kekuasaan dari dua sumber yaitu Allah Swt dan Rasul-Nya dengan jalan menerapkan semua ketentuan yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan hadits, dan kekuasaan dari rakyat yang telah memilih khalifah melalui wakil-wakilnya di Majelis Syura (lembaga legislatif) dengan jalan musyawarah. Kedua wewenang dan kekuasaan yang dimiliki oleh khalifah itu meminta pertanggungjawaban yang bersifat ganda.Pertanggungjawaban kepada Allah dihari kemudian, dan pertanggungjawaban kepada manusia di dunia ini.

Pertanggungjawaban terhadap rakyat yang telah memilihnya melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga legislatif (majelis Syura) menuntut seorang khalifah harus senantiasa melakukan kepemimpinannya secara terbuka dan bersedia dikoreksi oleh rakyatnya. Tanpa harus tersinggung dan terhina. Setiap kebijakan politik yang diambil oleh seorang khalifah dapat

²²Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan : Apakah Kepemimpinan Abnormal itu ?* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1998),h.5.

dipertanggungjawabkannya di depan wakil-wakil rakyat. Wakil rakyat secara individual atau kelompok, dapat meminta pertanggungjawaban atas setiap kebijakan politik yang telah diambil seorang khalifah baik secara lisan maupun tulisan.

3) Hak dan Kewajiban Pemimpin

Hak pemimpin menurut al-Mawardi ada dua yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, apabila kita pelajari sejarah ternyata ada haklain bagi imam yaitu hak untuk mendapat imbalan dari harta baitul mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam.²³

Kepala negara yang menurut al-Mawardi sebagai, Penganti Rasul, memiliki sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kepala negara. Kewajiban-kewajiban itu menurut al-Mawardi meliputi: Pertama, melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang establish, dan ijma generasi salaf. Jika muncul pembuat bid'ah, atau orang sesat yang membuat syubhat tentang agama, ia menjelaskan hujjah kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya, dan menindaknya sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindungi dari segala penyimpangan dan ummat terlindungi dari usaha penyesatan. Kedua, menerapkan hukum kepada dua pihak

²³ Abdul Qodir Djaelani, *Negara Ideal, Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, (Bina Ilmu, Cetakan Pertama: Surabaya, 1995). h. 173.

yang berperkara, dan menghentikan perseteruan antara dua pihak yang berselisish, agar keadilan menyebar secara merata, kemudian orang kuat tidak sewenang-wenang, dan orang yang teraniaya (lemah) tidak merasa lemah.

Ketiga, melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat leluasa bekerja, dan bepergian ke tempat mana pun dengan aman darigangguan terhadap jiwa dan harta. Keempat, menegakkan supremasi hukum (*hudûd*) untuk melindungi larangan-larangan Allah swt dari upaya-upaya pelanggaran terhadap larangan tersebut, dan melindungi hak-hak hamba-Nya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya. Kelima, melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu mendapatkan tempat untuk menerobos masuk guna merusak kehormatan, atau menumpahkan darah orang Muslim, atau orang yang berdamai dengan orang Muslim. Keenam, memerangi orang yang menentang Islam setelah mendakwahi hingga ia masuk Islam, atau masuk dalam perlindungan kaum muslimin (*ahl dzimmah*), agar hak Allah terlaksana yaitu kemenangan-Nya atas seluruh agama. Ketujuh, mengambil fai (harta yang didapatkan kaum muslimin tanpa pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan syari'at secara tekstual atau jihad tanpa rasa takut dan paksa. Kedelapan, menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam baitul mal (kas negara) tanpa berlebih-lebihan, kemudian

mengeluarkannya tepat pada waktunya, tidak mempercepat atau menunda pengeluarannya.

Kesembilan, mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan orang-orang yang jujur untuk mengurus masalah keuangan, agar tugas-tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli, dan keuangan dipegang oleh orang-orang yang jujur. Kesepuluh, terjun langsung menangani segala persoalan, dan menginspeksi keadaan, agar ia sendiri yang memimpin umat dan melindungi agama.

Apabila kepala negara atau khalifah telah menunaikan hak umat atau kewajibannya sebagai kepala negara, maka secara otomatis ia telah menunaikan hak Allah. Maka dengan sendirinya pula ia (kepala negara) mempunyai hak atas umat.²⁴

F. Konsep Pemimpin Dalam Mengelola Keuangan Negara Dalam Islam (Siyasah Maliyah)

Dalam hal mengenai pemimpin Imam al-Mawardi membicarakan tentang apakah keberadaan imamah menjadi wajib karena pertimbangan akal (bil a'ql) atau karena hukum agama (bis syar'i). Dalam hal ini Al-Mawardi mengatakan:

هَلْ الْخِلَافَةُ وَاجِبَةٌ بِالشَّرْعِ أَمْ بِالْعَقْلِ؟

²⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah (Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam)*, terj. Fadhli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2000), h. 26.

وَأُخْلِيفَ فِي وُجُوبِهَا هَلْ وَجِبَتْ بِالْعَقْلِ أَوْ بِالشَّرْعِ؟ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: وَجِبَتْ بِالْعَقْلِ لِمَا فِي طِبَاعِ الْعُقَلَاءِ مِنَ التَّسْلِيمِ لِزَعِيمِ يَمْنَعُهُمْ مِنَ الظُّلْمِ، وَيُفَصِّلُ بَيْنَهُمْ فِي التَّنَازُعِ وَالتَّخَاصُمِ، وَلَوْلَا الْوَلَاةُ لَكَانُوا فَوْضَى مُهْمَلِينَ، وَهَمَجًا مُضَاعِينَ،

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى: بَلْ وَجِبَتْ بِالشَّرْعِ دُونَ الْعَقْلِ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ يَقُومُ بِأُمُورٍ شَرَعِيَّةٍ قَدْ كَانَ مُجَوِّرًا فِي الْعَقْلِ أَنْ لَا يَرِدَ التَّعَبُّدُ بِهَا، فَلَمْ يَكُنِ الْعَقْلُ مُوجِبًا لَهَا، وَإِنَّمَا أَوْجَبَ الْعَقْلُ أَنْ يَمْنَعَ كُلَّ وَاحِدٍ نَفْسَهُ مِنَ الْعُقَلَاءِ عَنِ الظُّلْمِ وَالتَّقَاطُعِ، وَيَأْخُذَ بِمُقْتَضَى الْعَدْلِ فِي التَّنَاصُفِ وَالتَّوَاصُلِ، فَيَتَدَبَّرُ بِعَقْلِهِ لَا بِعَقْلِ غَيْرِهِ، وَلَكِنْ جَاءَ الشَّرْعُ بِتَقْوِيضِ الْأُمُورِ إِلَى وَلِيِّهِ فِي الدِّينِ، قَالَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59]

فَقَرَضَ عَلَيْنَا طَاعَةَ أُولِي الْأَمْرِ فِينَا، وَهُمْ الْأَيْمَةُ الْمُتَأَمَّرُونَ عَلَيْنَا.

Dari kutipan tulisan Al-Mawardi di atas, Al-Mawardi mengemukakan dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan wajib secara akal , sedang yang kedua menyatakan wajib secara agama.

Pada umumnya, pemikir muslim rasionalis berpendapat bahwa pengangkatan kepala negara itu merupakan kebutuhan manusia yang selalu hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia yang selalu hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Dalam pergaulan itu dimungkinkan terjadi perselisihan, penindasan dan lain-lain. Ketika itulah, naluri manusia menginginkan adanya orang-orang yang melindungi dari kemungkinan-kemungkinan itu. Dengan demikian, adanya seorang pemimpin dalam masyarakat merupakan Cindisio Sine Quanon. Hal ini berarti, bahwa secara aqli sudah dipastikan mesti adanya pemimpin. Seandainya wahyu tidak turun menyangkut keberadaan pemimpin,

maka manusia, berdasarkan aqalnya, sudah dapat menentukan sikapnya menyangkut keberadaan pemimpin itu.

Berbeda dengan pendapat pertama, kelompok tekstualis berpendapat bahwa kewajiban menyangkut pemimpin hanya dapat diketahui berdasarkan syari'at. Mereka beralasan, bahwa tugas seorang pemimpin adalah menjaga, mengatur dan melaksanakan syari'at. Diakui oleh mereka, bahwa akal manusia dapat menentukan keharusan menjaga diri dari kedzaliman dan pertengkar, karena pada dasarnya manusia cinta perdamaian, keadilan dan kebaikan. Lebih jauh mereka berdalih, jika hanya semata-mata berdasarkan akal, boleh jadi suatu masyarakat tidak perlu lagi kepada pemimpin, cukup diselesaikan sesama mereka yang mempunyai naluri damai dan adil itu. Karena itu, menurut mereka, kewajiban mengangkat kepala negara itu bukan berdasarkan akal melainkan berdasarkan syari'at. Dalil yang digunakan mereka antara lain Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ { [النساء: 59]}

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (An-Nisaa:59)

Mengenai pendapat imam al-mawardi diatas dapat disimpulkan bahwa tugas imam atau pemimpin bukan hanya khusus dalam bidang syariat melainkan juga politik negara, misalnya dalam mengatur keuangan negara. Yang dimaksud politik keuangan bagi suatu Negara adalah pengaturan sumber-sumber pemasukan dan pendayagunaan keuangan, yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan kepentingan umum, tanpa harus mengakibatkan kepentingan

individu dan kepentingan yang sifatnya tertentu menjadi korban.²⁵ Secara etimologi *Siyasah Maliah* ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi *Siyasah Maliah* adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.²⁶ Jadi, pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik. Karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangan diatur sedemikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, dan hal-hal yang lainnya; yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut. Mengenai sumber pendapatan negara untuk membiayai segala aspek aktivitas negara, ada beberapa perbedaan pendapat: Menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya *As-Siyasatus Syari'ah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah* (Pokok-Pokok Pedoman Islam dalam Bernegara) menyebutkan bahwa hanya ada dua sumber pendapatan negara, yaitu zakat dan harta rampasan perang. Sedangkan pendapat Muhammd Rasyid Ridha, dalam bukunya *Al-Wahyu al-Muhammady* (wahyu Ilahi kepada Muhammad), menyatakan bahwa selain zakat dan harta rampasan perang seperti yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah ditambahkannya jizyah (pemberian) yang didapatkan dari golongan minoritas (non muslim) sebagai jaminan kepada mereka, baik jaminan keamanan dan keselamatan jiwa dan harta benda mereka maupun jaminan hak-hak asasi mereka. Lain halnya dengan Yusuf

²⁵<https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/7672/1/SKRIPSI%20fulL%20Riski%20Ulfa%20Nazilla.pdf>

Qhardawi, ia menyatakan, selain hal-hal diatas, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, karena jika hanya ada tiga macam sumber pendapatan negara, dapat dipastikan pendapatan tersebut tidak mungkin dapat membiayai semua kegiatan negara, yang makin hari makin luas dan besar. Begitu pula pendapat Abdul Wahhab Kahallaf yang sama halnya dengan Qardhawi, beliau pun menambahkan harta pusaka orang yang tidak meninggalkan ahli waris termasuk dari sumber keuangan negara.

Ketentuan syariat, baik Al-Quran maupun hadis Nabi saw, yang mengatur secara langsung masalah baitul mal ini, memang tidak ada ketentuan syar'i yang kita peroleh hanya dari atsar para khulafaur Rasyidin yang dilakukan dalam praktek penyelenggaraan negara. Meski demikian, posisi baitul mal begitu penting bagi kehidupan negara islam sebagai lembaga penyimpanan harta kekayaan negara, yang bertanggung jawab atas harta kekayaan negara, baik dalam pemasukanya, penyimpanan dan pengeluaranya, sudah menjadi keharusan di dalam sistem negara islam.²⁷

Di dalam praktek penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh para khulafaur Rasyidin, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan masalah baitul mal ini. Pada masa pemerintahan khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, penggunaan harta kekayaan negara dari baitul mal begitu ketat dan teliti, sehingga kedua orang khalifah tersebut tidak berani menggunakannya, walau untuk diri pribadinya sebagai kepala negara, kalau

²⁷<https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/7672/1/SKRIPSI%20fulL%20Riski%20Ulfa%20Nazilla.pdf> diunduh pada 23 oktober 2019

bukan keadaan benar-benar memerlukan. Kedua khalifah itu lebih baik mencari nafkah dengan cara berdagang untuk memenuhi keperluan dan keluarganya, daripada menggunakan harta kekayaan negara dari baitul mal. Tetapi, keadaan berbeda dalam pemerintahan usman bin Affan. Dia begitu mudah menggunakan harta kekayaan negara dari baitul mal, baik untuk keperluan diri dan keluarganya maupun untuk keperluan keluarga familinya yang kebetulan menjadi pejabat tinggi negara. Karena itu, Abdullah bin Al Arqam, kepala baitul mal pusat di madinah, menolak permintaan khalifah Usman bin Affan. Bukan hanya sampai disitu, Abdullah bin Al Arqam sebagai tindakan protes atas kebijaksanaan khalifah dalam menggunakan harta kekayaan negara, menyatakan mengundurkan diri dan berhenti sebagai kepala baitul mal.²⁸

Dari peristiwa yang pernah terjadi pada masa khulafaur Rasyidin ini, di samping mengingat pentingnya posisi lembaga baitul mal di dalam sistem negara islam, kami mengajukan beberapa usul sebagai berikut:²⁹ Lembaga baitul mal adalah badan otonom yang berdiri bebas sebagai salah satu lembaga tinggi negara. Pimpinan lembaga ini diangkat dan diberhentikan oleh khalifah atas persetujuan majelis syura. Tanpa persetujuan majelis syura, pengangkatan pimpinan baitul mal tidak sah. Lembaga ini secara horizontal sejajar dengan lembaga eksekutif dan yudikatif, dan secara vertikal mempunyai

²⁸<https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/siyasah-maliyah-hukum-politik-islam-oleh-rahmat-yudistiawan/> diunduh pada 23 oktober 2019

²⁹<https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/siyasah-maliyah-hukum-politik-islam-oleh-rahmat-yudistiawan/> diunduh pada 23 oktober 2019

wakilnya di tiap daerah, baik di provinsi maupun kabupaten atau walikota.

Lembaga ini berkewajiban untuk mencari sumber-sumber pendapatan negara, memelihara dan menyimpannya, serta menghemat pengeluaran anggaran biaya negara. Dalam tugas untuk mencari sumber-sumber pendapatan negara, baitul mal bekerja sama dengan departemen keuangan yang berada di dalam lembaga eksekutif. Setiap penyusunan rancangan pendapatan dan anggaran belanja negara yang disusun oleh pemerintah (eksekutif) harus ada penyesuaian terlebih dahulu oleh baitul mal sebelum diajukan kepada majelis syura. Lembaga baitul mal berfungsi sebagai badan pengawas keuangan, yang bertugas untuk mengontrol semua penggunaan dana negara yang dilakukan oleh eksekutif, yudikatif, maupun legislatif.

Lembaga baitul mal berhak untuk mengambil tindakan hukum atas segala penyelewengan yang dilakukan oleh semua aparat negara dengan alasan mengajukannya kepada mahkamah agung, agar diproses di depan pengadilan. Adapun Ibnu Humam, pengarang kitab "Al Bada'i" berkata bahwa: harta yang dimasukan pada kas negara (baitul mal) ada empat macam (konsep Baitul Mal):³⁰*Pertama:* harta zakat binatang ternak dan pertanian dan harta yang di pungut dari para pedagang muslim. *Kedua:* harta dari pajak tanah, upeti dari setiap pembayar pajak, harta shadakah karena terjadi perdamaian antara bani hijran dan bani hilal dan bani taghlin dan harta yang di pungut dari para pedagang non muslim (seperti orang-orang kafir zimmi, musta'min dan

³⁰<https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/siyasah-maliyah-hukum-politik-islam-oleh-rahmat-yudistiawan/>, diunduh pada 21 september 2019

orang-orang kafir yang memerangi umat islam).*Keempat*: harta pusaka milik orang yang meninggal dunia, tetapi dia tidak meninggalkan ahli waris, atau meninggal suami atau istri.

Adapun pos penyaluran jenis harta yang pertama adalah sebagaimana penyaluran zakat bagi 8 muzakki sesuai dengan penjelasan Allah SWT yang termuat dalam firman-Nya: “sesungguhnya zakat-zakat itu, bagi orang-orang fakir dan miskin, dst”.Kemudian, penyaluran harta yang kedua yang meliputi harta seperlima dari rampasan perang, hasil tambang dan rikaz telah saya kemukakan dalam kitab “Biografi”, sebagaimana Allah SWT menegaskan dalam kitab-Nya: ketahuillah! Sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang”.Adapun pos penyaluran harta jenis ketiga yang berupa pajak dan sejenisnya adalah dipergunakan untuk menyemarakkan dan menumbuh suburkan agama islam dan memperbaiki kepentingan-kepentingan umat islam, seperti dipergunakan untuk menggaji para pejabat, para hakim, para ulama yang diberi tugas memberikan fatwa, para prajurit, para penjaga jalan, orang-orang yang membangun masjid-masjid, benteng-benteng dan dipergunakan untuk membiayai perbaikan sungai-sungai yang tak seorangpun berhak memilikinya itu.

Mengenai harta jenis keempat ialah dipergunakan untuk memberikan dana pengobatan bagi orang-orang fakir dan miskin yang sedang menderita sakit, untuk membeli kain-kain kafan yang diberikan kepada orang-orang yang meninggal dunia, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai harta sama sekali, untuk membiayai kehidupan anak yang di temukan di jalan serta membayar

diyat bila dia mengerjakan tindakan kriminal, untuk membiayai kehidupan orang yang sudah yang tidak mampu bekerja, karena tidak ada orang yang menanggungnya, an lain sebagainya. Atas dasar itu, maka seorang pemimpin wajib mnyalurkan hak-hak tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Sedangkan yang dimaksud dengan penyaluran harta untuk Allah SWT. dan untuk membela agama Allah swt. adalah bahwa harta tersebut disalurkan demi untuk kepentingan umum yang tidak untuk satu jenis kepentingan tertentu saja. Semuanya dikembalikan kepada Allah swt. Dengan demikian, seluruh sumber keuangan negara islam sama-sama dipergunakan demi kepentingan umum. Hanya saja setiap penyaluran sumber keuangan itu tidak menetapkan secara pasti terhadap kepentingan umum. Hal ini hanya disebutkan sebagian jenis kemaslahatan dengan harapan dapat mengalihkan pandangan agar tertuju kepadanya dan juga untuk mengingatkan kepada semua pihak penguasa supaya mereka tetap memeliharanya sebaik mungkin.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Kabupaten Aceh Tenggara

Aceh Tenggara adalah salah satu Kabupaten di Propinsi Aceh yang merupakan daerah cagar alam nasional terbesar yang terdapat di Aceh. Pada dasarnya wilayah Kabupaten Aceh Tenggara kaya akan potensi alam, salah satu diantaranya adalah Sungai Alas. Secara umum ditinjau dari potensi pengembangan ekonomi, wilayah ini termasuk zona pertanian. Potensi ekonomi daerah berhawa sejuk ini adalah kopi dan hasil hutan. Dalam bidang Pertambangan, Aceh Tenggara memiliki deposit bahan galian golongan-C yang sangat beragam dan potensial dalam jumlah cadangannya. Kabupaten Aceh Tenggara merupakan bagian dari Provinsi Aceh dengan luas wilayah seluas 4.165,63 km². Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Darul Hasanah 1.347,25 km², sedangkan wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Babussalam 9,42 km². Dari jumlah luasan ini diperkirakan dua pertiganya masuk kedalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari 16 Kecamatan dan 386 Desa serta 51 mukim. Kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara antara lain Kecamatan Lawe Alas, Babul Rahmah, Tanoh Alas, Lawe Sigala, Babul Makmur, Semadam, Leuser, Babel, Bukit Tusam, Lawe Sumur, Babussalam, Lawe Bulan, Badar, Darul Hasanah, Ketambe, dan Deleng

Pokhison, yang mempunyai jumlah luas keseluruhan 4.165,63 Km².

Ditinjau dari aspek fisiografi kawasan, wilayah Kabupaten Aceh Tenggara memiliki 2 karakteristik kawasan yaitu kawasan dataran dan kawasan pegunungan. Dua karakteristik topologi kawasan ini mengindikasikan adanya 2 kegiatan budidaya utama yaitu wilayah dataran yang memberikan peluang sebagai sentra pengembangan komoditi tanaman pangan berupa padi, palawija, tanaman hortikultura seperti buah- buahan, sayuran dan tanaman hias juga berpeluang dikembangkan untuk sektor peternakan dan perikanan darat. Wilayah pedalaman yang memiliki topografi berbukit diprioritaskan pengembangannya sebagai kawasan perkebunan rakyat maupun perkebunan besar.

1. Letak Geografis Desa Biak Muli

Desa biak muli merupakan sebuah desa yang terletak di kecamatan Bimbel aceh tenggara , di mana desa tersebut merupakan sebuah desa terpencil yang butuh waktu setidaknya 1 jam untuk ke kecamatan. Secara geografis Desa Biak muli berbatas dengan desa lain yaitu, sebelah utara dengan desa kute seri, sebelah barat dengan desa bembel gabungan, sebelah selatan berbatas dengan desa kuta buluh, dan sebelah timur berbatas dengan pulo perengge.

TABEL I

No	Batas Wilayah	Berbatasan Dengan
1	Sebelah Timur	Desa Pulo Perengge
2	Sebelah Barat	Bembel Gabungan
3	Sebelah Utara	Desa Kute Seri
4	Sebelah selatan	Desa Kuta Buluh

BATAS WILAYAH

Sumber Data : Arsip Kantor Desa Biak Muli

2. Keadaan Demografi Desa Biak Muli

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) demografis adalah ilmu tentang susunan, jumlah dan perkembangan penduduk, ilmu yang memberikan gambaran statistik mengenai suatu bangsa dilihat dari sudut sosial politik, ilmu kependudukan.³¹ Desa Biak Muli dengan kondisi agraris ini memiliki luas sebesar 1.721,00 Ha, yang terdiri dari sawah dengan luas 100,00 Ha, tanah kering dengan luas 350,00 Ha, tanah basah 0,00 Ha, tanah perkebunan dengan

³¹Tim Penyusun Kamus Besar Pembinaan Dan Pembangunan Bahasa (P3B) Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ,Cetakan. Ke VII, Edisi Ke-2, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005) ,h.212.

luas 1.250,00 Ha, fasilitas umum dengan luas 21,00 Ha, hutan dengan luas 0,00 Ha. Iklim di desa Suka Jaya memiliki curah hujan sebesar 1,99 mm, jumlah bulan hujan 6 bulan, suhu rata-rata harian 30 derajat celcius dan ketinggian antara 40 meter di atas permukaan laut (mdpl).

3. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari beberapa suku, antara lain suku Alas, Gayo, singkil, Jawa, Karo dan Batak. Berdasarkan data penduduk Tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tenggara berjumlah 207.390 jiwa yang terdiri dari laki-laki 104.488 jiwa dan perempuan sejumlah 102.902 jiwa. Jika dilihat perkembangannya dari Tahun 2008 sampai 2010 jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Tenggara terus meningkat. Dari 198.573 jiwa di Tahun 2008 naik menjadi 207.390 jiwa di Tahun 2010. Dilihat dari Kecamatan, jumlah penduduk terbesar pada Tahun 2010 ada di Kecamatan Babussalam yaitu sebesar 25.976 jiwa (12.53% dari total penduduk). Sementara itu, Kecamatan dengan jumlah penduduk terendah ada di Kecamatan Tanoh Alas dengan jumlah 4.661 jiwa (2.25 % dari total penduduk). Pada tahun 2010 penduduk miskin di Kabupaten Aceh Tenggara tercatat sebesar 30.039 jiwa naik sekitar 2.174 dari tahun 2009 yang hanya sekitar 27.865 jiwa.

Desa Biak Muli memiliki jumlah Penduduk yang lumayan banyak yaitu 1000 jiwa. Terdiri dari 480 jiwa laki-laki + 520 jiwa perempuan = 1000 jiwa.³²

4. Adat, Agama dan Budaya

Perkembangan suatu Hukum berkaitan erat dengan masyarakat. Sebab lahirnya dasar Hukum adalah dengan hanya berkumpulnya lebih dari satu orang di satu lingkungan, dimana antara individu-individu ini terjadi hubungan ikatan yang membutuhkan pengaturan. Lahirnya dasar utama adalah akibat hasil pemikiran manusia dalam mewujudkan penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam masyarakat tersebut dengan merealisasikan keadilan membantu terwujudnya ketenteraman.³³

Adat merupakan wujud gagasan budaya yang terdiri atas dasar nilai-nilai budaya, norma hukum dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi satu sistem³⁴. Orang Aceh kaya akan adat istiadat, kesenian dan tarian-tarian. Untuk setiap kabupaten mempunyai perbedaan dan variasi masing-masing. Hal ini dapat dilihat pada upacara perkawinan, kelahiran bayi, turun ke sawah, turun ke laut, tepung tawar, maulid nabi, nuzulul quran (17 Ramadhan) dan lain-lain. Begitu juga dengan budaya masyarakat Desa Biak Muli yang terletak di Aceh Tenggara memiliki budaya sendiri sebagai cermin dari kepribadian mereka yang diwariskan turun

³² Sumber Data : Arsip Desa kantor Desa Biak Muli 2018-2019

³³ Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam*, (Jakarta: Khalifah, 2004), h. 485.

³⁴ M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta: Grafindo Lentera Media, 2012), h.21.

temurun dari generasi kegenerasi berikutnya. Generasi pewaris budaya ini selalu mereformasikan bila ada yang bertentangan dengan Syariah Islam. Hasil reformasi itu terciptalah budaya Aceh yang paling islami ketimbang adat-adat daerah lain di kepulauan nusantara ini. Namun tidak semua orang di desa ini orang suku aceh ada juga suku Batak .

Adat diurus oleh raja (umara) dan hukum (Islam) diurus oleh ulama. Desa Biak Muli merupakan desa yang masih kental dengan kebudayaan Aceh yang sering dilakukan tiap moment penting dan berharga, seperti acara Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang dilakukan dalam bentuk menyelenggarakan acara ceramah yang mendatangkan penceramah dari luar daerah, dan juga seperti mengadakan shalat tasbih berjama'ah sebagai wujud syukur kepada Allah SWT. Sistem sosial dan budaya masyarakat yang kental dengan nilai keislaman. Hal ini dapat diamati dari struktur pemerintahan paling bawah yang dikenal dengan istilah gampong, di pimpin oleh seorang imam yang mengurus masalah agama.³⁵

Meskipun di desa ini bukan hanya suku aceh atau disebut juga suku alas yang mayoritasnya muslim , juga ada masyarakat di desa ini yang bersuku gayo, pak-pak dan batak. Namun, semua masyarakat di desa ini Saling menghargai dan hidup rukun. Namun mengenai tempat ibadah di desa ini sangat minim karena infrastrukturnya kurang baik.

³⁵ Ibid h. 22

5. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap Anak Bangsa. Kesempatan memperoleh pendidikan sampai ke tingkat perguruan tinggi hak bagi setiap Warga Negara Indonesia. Oleh karena itu kepedulian semua pihak dalam rangka pengadaan sarana pendidikan di setiap Desa menjadi hal yang sangat urgen pada saat ini, terutama untuk jenjang Pendidikan Dasar. Perlu untuk dipahami bahwa masalah Pendidikan bukanlah semata-mata urusan Pemerintah, namun harus menjadi perhatian dan tanggungjawab semua elemen masyarakat. Keterpaduan dan kesamaan sikap pihak pemerintah dan masyarakat dalam memikirkan masalah perkembangan pembangunan sektor Pendidikan menjadi hal yang sangat penting dan sebaiknya harus mendapatkan prioritas utama. Proses untuk mencapai kemajuan, dan perkembangan otonomi Daerah di Aceh Tenggara dengan baik, bisa dilihat tersedianya sarana prasarana pembangunan untuk kepentingan Pendidikan. Sarana dan prasarana tersebut meliputi sarana Pendidikan. Sektor Pendidikan di Kabupaten Aceh Tenggara dewasa ini sudah boleh dikatakan meningkat dan lebih maju kalau dibandingkan dengan masa yang lalu. Hal ini dapat dilihat dari segi banyaknya sekolah yang tersedia dan tenaga pengajarpun sudah memadai. Tetapi masih banyak terdapat kekurangan dari segi fasilitas gedung dan ruang kelas. Namun di Desa Biak Muli fasilitas sekolah belum memadai dalam satu desa hanya ada 4 sekolah, yaitu 2 TK Swasta, 1 SMP negeri, 1 SD Swasta.

6. Mata Pencarian Penduduk

Perkembangan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh perkembangan penduduknya, baik ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas. Oleh sebab itu, penduduk merupakan bagian yang sangat penting dalam perkembangan dan kemajuan suatu wilayah. Oleh karena penduduk di Desa Biak Muli berjumlah 1000 jiwa terdiri dari 480 jiwa laki-laki + 520 jiwa perempuan = 1000 jiwa. Penduduk Desa Biak Muli memiliki mata pencarian berbeda-beda.

secara garis besar ada dua mata pencarian yaitu: pertama, pekerjaan tetap seperti PNS, TNI/Polri dan Dagang, kedua, pekerjaan tidak tetap seperti buruh bangunan, tukang bengkel, supir, tukang jahit, petani

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran di Desa Biak Muli kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa akan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Negara memberikan kewenangan Desa dalam melestarikan adat dan tradisi serta budaya masyarakat Desa. Desa juga diberikan kewenangan dalam pembangunan untuk memprakasa dan peran partisipasi yang besar dalam rangka menggali potensi Desa dengan mendorong Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan di Desa dengan tujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang akhirnya memberikan kesejahteraan bersama dan menempatkan Desa sebagai subjek dari pembangunan. Kedudukan ini memberikan angin segar kepada Desa dalam proses percepatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa. Berdasarkan gambaran di atas berikut ini wawancara yang dilakukan dengan kepala desa Biak Muli yaitu bapak Junaidi yang penulis lakukan pada saat penelitian³⁶:

³⁶ Wawancara Pribadi dengan bapak junaidi 10 mei 2020.

1. Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa

Wawancara pertama dilakukan dengan kepala desa, berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan: “setiap tahun desa Biak Muli mengadakan penyusunan anggaran, karena setiap tahun pula melakukan pembangunan baik itu infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat, penyusunan anggaran mufakat/musyawarah dan keputusan bersama yang difasilitasi oleh perangkat desa dan diikuti oleh seluruh masyarakat desa yang diberikan kesempatan yang sama”.

2. Mekanisme Penyusunan Anggaran Penerimaan Dan Belanja Desa

Selanjutnya dalam wawancara mengenai mekanisme penyusunan desa yang dilakukan di gampong biak muli bapak kepala desa menjelaskan bahwa: “Berdasarkan musyawarah desa yang melibatkan Unsur-unsur yang terkait.RAPBD. Setelah penyusunan lalu disahkan oleh kunci Desa dan di SK kan rumah jangan diajukan ke Kecamatan untuk diantar dan diprioritaskan” .

3. Elemen yang terlibat dalam Penyusunan Anggaran Penerimaan Dan Belanja Desa

Dalam wawancara selanjutnya tentang keterlibatan masyarakat gampong keuchik menjelaskan:“ Mereka yang terlibat selama ini dalam penyusunan anggaran gampong yaitu Aparat desa, Tuha dan Anggota Tuha Peut, Kaur Pemerintah, Kaur Keuangan, Masyarakat dimana didalamnya terdapat unsur perempuan dan pemuda yang ada di gampong biak muli” Peran dan tugas yang diberikan oleh pemerintah gampong dalam Penyusunan Anggaran Penerimaan

Dan Belanja Desa

Selanjutnya wawancara dilakukan tentang tugas dan peran yang dilakukan oleh pemerintah gampong dalam penyusunan APBD yang selama ini dilakukan, beliau menuturkan bahwa: “Untuk melakukan memfasilitasi setiap ada musyawarah. Bertanggung jawab setiap ada penyelewengan yang dilakukan oleh anggota maupun aparat desa. Melakukan Audit dan pengawasan agar tetap sama dan tugas yang dilakukan”.

Pedoman ada yang digunakan oleh pemerintah gampong dalam melakukan Penyusunan Anggaran Penerimaan Dan Belanja desa Kemudian dalam wawancara yang penulis lakukan yaitu mengenai pedoman penyusunan anggaran penerimaan dan belanja gampong, beliau menjelaskan bahwa: “ **Ada buku pedoman yang diberikan untuk melakukan penyusunan anggaran sesuai aturan yang baku. Sesuai teknis dan pelatihan yang sudah di pelajari di tingkat kecamatan**”.

Selanjutnya beliau menjelaskan mengenai tatacara secara keseluruhan dalam penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa:“ Tata cara pelaporan Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa diatur dengan Peraturan Bupati. Tata cara pelaporan dan penggunaan dana diatur sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan keuangan desa Khusus pelaporan Dana desa untuk semester I dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Juli, Sedangkan untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun berikutnya. Kepala daerah menyampaikan laporan konsolidasi penyaluran Dana Gampong dengan

tembusan ke kementerian paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya. Keterlambatan penyampaian laporan akan mengakibatkan penundaan penyaluran Dana Gampong ke RKUD, di tingkat Kabupaten Natuna penyampaian laporan diatur lebih ketat dengan tujuan agar sistem pengendalian intern dapat berjalan dengan maksimal sehingga terjadinya penyelewengan dapat dihindari. Dalam pelaksanaannya, kewajiban desa adalah juga menyampaikan Laporan Konfirmasi Dana Transfer ke desa agar penyaluran dari RKUD ke Rekening Kas desa dapat disajikan secara akuntabel”.

4. Pembangunan di Desa Biak muli

Dalam skala prioritas pembangunan di Desa biak muli beliau menjelaskan bahwa: “Infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pengembangan potensi masyarakat sesuai bidang masing-masing”. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Ketentuan yang mengatur Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dari Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Perubahan bentuk otonomi daerah dalam era reformasi ini ditandai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat di daerah setempat disertai dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya alam secara adil melalui perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pemerintahan desa sebagai suatu bentuk pemerintahan terendah yang otonom, agar dapat melaksanakan otonomi dengan baik, maka penyelenggaraan pemerintahannya harus memiliki faktor utama yang dikatakan berotonomi adalah faktor sumber daya manusia sebagai pelaksananya, faktor keuangan, faktor sarana dan prasarana penunjang serta kelembagaan. Pemerintah desa yang keberadaannya berhubungan langsung dengan masyarakat dan sebagai ujung tombak pembangunan, maka pemerintahan desa semakin dituntut kesiapannya baik dalam hal merumuskan kebijakan desa (dalam bentuk peraturan desa), merencanakan pembangunan desa yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta dalam memberikan pelayanan rutin kepada masyarakat.

Salah satu faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi tersebut adalah faktor keuangan, karena penyelenggaraan pemerintahan desa memerlukan biaya untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Semakin besar jumlah uang yang dimiliki desa semakin banyak pula kegiatan yang dapat

dilaksanakan. Desa sebagai daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan atau pendapatan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri, dengan kata lain adanya kemandirian atau otonomi desa dalam mengelola anggaran dan pendapatan dan belanja desa.

Pengelolaan keuangan desa menyangkut dengan kekayaan desa, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa. Implementasi otonomi daerah bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa.

Berdasarkan hal tersebut, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa baik di tingkat nasional hingga daerah. Kewenangan daerah untuk mengatur proporsi anggaran pembangunan desa

sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa.

Pelaksanaan otonomi desa mendorong pemerintah dan masyarakat desa untuk lebih mandiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desa, termasuk dalam hal ini adalah mengatur dan mengurus Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBD), Pendapatan Asli desa (PAD) sebagai salah satu sumber anggaran penerimaan atau pendapatan desa memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan Gampong, dan bagi pelaksanaan otonomi desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa diperlukan kepastian biaya yang berasal dari berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat. Dalam UU dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintahan menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang tersebut diatur tentang desa sebagai kesatuan hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di dalam wilayah kabupaten. Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa

pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum.

APBD desa adalah instrumen penting yang sangat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di desa. Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBD Sebagai pemegang otonomi asli, desa bisa mengambil prakarsa dan inisiatif dalam mengelola keuangan desa, Tanpa adanya intervensi dari pemerintah di atasnya atau supra desa. Hal ini berarti dengan adanya otonomi desa, maka desa lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan dibingkai APBD . Anggaran pendapatan belanja desa (APBD) pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama masyarakat yang dituangkan kedalam peraturan desa dan sesuai pedoman yang di buat oleh Bupati.

Meskipun dalam penyusunan APBD desa ini berpedoman pada Perda Kabupaten, tapi prioritas masing-masing Desa bisa berbeda. Ini sangat tergantung dari kondisi riil masing-masing Desa, dan menyangkut potensi dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dari Masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan APBD desa menjadikan APBD desa yang partisipatif. Besar kecilnya

partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pembangunan, karena pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di desa. Sehingga penilaian terhadap aparatur desa tidak negatif dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Persepsi akan timbul bilamana dalam menjalankan tugas tidak sesuai dengan harapan masyarakat desa. Prosedur yang dipersulit dijadikan kepentingan pribadi atau komunitas yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Pada tingkat pelaksanaannya, saat ini masih banyak masalah yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran.

Kenyataan yang demikian disebabkan oleh empat faktor utama. *Pertama*: desa memiliki APBDesa yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. *Kedua*: kesejahteraan masyarakat desa rendah. *Ketiga*: rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. *Keempat*: bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas. Partisipasi Masyarakat dan kontrol terhadap pemerintah desa dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBDesa.

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, untuk mendukung

perkembangan desa untuk lebih baik. Maka dari itu dibutuhkan transparansi dari aparat desa serta masyarakat. Juga menjalin komunikasi yang baik antara elemen yang bekepentingan (Masyarakat dan aparat Desa). Fungsi kontrol ini sangat penting untuk melihat sejauhmana transparansi pengelolaan keuangan pemerintah desa selama satu tahun berjalan. Meskipun dana yang dimiliki oleh suatu desa tidak besar, tetapi bila tidak diatur dengan baik dalam perencanaan dan penggunaannya, maka akan mengakibatkan dana tersebut menjadi sia-sia atau tidak bisa memberikan hasil yang maksimal kepada desa tersebut. Menurut Sukasmanto, dalam proses implementasi anggaran desa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat, dan disusun secara profesional. Kaitannya dengan pendidikan kewarganegaraan adalah kita pernah menempuh mata kuliah pemerintahan daerah, menyusun APBDesa ini dilakukan di pemerintahan desa. Pemerintahan desa termasuk dalam pemerintahan daerah.

Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan peran-peran dari semua pihak di desa untuk merencanakan dan menyusun APBDesa dengan lebih realistis sesuai dengan kondisi keuangan dan asset desa. Seluruh aparat pemerintahan desa memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan APBDesa. Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat kita lihat bahwa di desa biak muli telah mekanisme penyusunan APBDesa yang selama ini dilakukan sudah mengikuti kepada mekanisme yang ditentukan oleh aturan dan ketentuan yang telah

ditetapkan baik oleh undang-undang maupun ketentuan yang ada di aceh secara umum dan Kabupaten Babel secara khusus.

B. Faktor-faktor pendukung serta penghambat Kepala Desa dalam Menetapkan Anggaran Desa di desa biak muli kecamatan Babel kabupaten Aceh Tenggara

Mengenai penyusunan dan penetapan anggaran desa dibahas bersama aparat Desa , dalam hal penyusunan dan penetapan yang sudah dijelaskan diatas , ada factor pendukung dan penghambat dalam menyusun dan menetapkan anggaran Desa di desa Biak Muli kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada sekretaris Desa Biak Muli, bahwa dalam praktiknya penyusunan dan penetapan anggaran desa bukanlah suatu hal yang mudah ditambah lagi terkadang pencairan dana yang terlambat , memang semua kita sudah susun dan rancang sesuai keinginan dan kebutuhan bersama namu, terkadang masih juga banyak kekurangan. Faktor-faktor Pendukung dalam menyusun dan menetapkan anggaran desa :

1. Kebutuhan infrastruktur
2. Adanya anggaran
3. Kebutuhan kegiatan bersama masyarakat
4. Adanya keperluan-keperluan mengenai perencanaan desa yang lebih berkembang.

Kalau faktor penghambat dalam penyusunan dan penetapan anggaran desa yaitu terkadang ada pencairan dana yang terlambat sehingga perencanaan yang mulanya dibuat tidak semua terealisasi, dan akibatnya banyak masyarakat menilai bahwa dana yang kami anggarkan di prioritaskan untuk kepentingan aparatur desa saja.³⁷

C. Prespektif fiqh siyasah terhadap Prioritas Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa

Al-Mawardi mengatakan bahwa pada umumnya, tugas pemimpin islam adalah menjaga kepentingan agama, urusan negara, dan umat. Al- Mawardi memang menekankan pada pemerintah untuk menjaga urusan agama. Baik dari aqidah, ibadah, muamalah, hingga akhlak dan budi pekerti masyarakatlah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, karena ini merupakan hal yang sangat penting. Bukan hanya masalah sandang, pangan dan papan sebagai hal yang penting, namun permasalahan agama tersebut lebih penting. jangan sampai berat sebelah, sehingga menciptakan kehidupan yang tidak seimbang seperti yang disebutkan diatas.

Al-Mawardi mengatakan mengenai tugas seorang khalifah negara yang dalam penjelasannya merinci masalah-masalah umum yang menjadi kekuasaan seorang khalifah ada sepuluh macam, antara lain: Pertama, menjaga prinsip-prinsip agama (*hifzu ad-din*) yang sudah tetap dan telah menjadi konsensus umat terdahulu. Kekuasaan inilah yang membedakan kepala negara Islam dengan kepala negara mana pun dari negara demokrasi di dunia ini, yang semata-mata hanya memimpin masalah-masalah duniawi. Khalifah sebagai kepala negara berkewajiban melindungi

³⁷ Sandra, sekretaris desa biak muli, wawancara Pribadi , 12 mei 2020

agama darisegalagangguan. Bukan hanya terhadap agama Islam yang menjadi asas negara, tetapi semua agama yang dianut rakyat harus mendapat perlindungan yang sama.

Seorang khalifah atau kepala negara secara formal memperoleh wewenang dan kekuasaan dari dua sumber yaitu Allah Swt dan Rasul-Nya dengan jalan menerapkan semua ketentuan yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan hadits, dan kekuasaan dari rakyat yang telah memilih khalifah melalui wakil-wakilnya di Majelis Syura (lembaga legislatif) dengan jalan musyawarah. Kedua wewenang dan kekuasaan yang dimiliki oleh khalifah itu meminta pertanggungjawaban yang bersifat ganda. Pertanggungjawaban kepada Allah dihari kemudian, dan pertanggungjawaban kepada manusia di dunia ini.

Pertanggungjawaban terhadap rakyat yang telah memilihnya melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga legislatif (majelis Syura) menuntut seorang khalifah harus senantiasa melakukan kepemimpinannya secara terbuka dan bersedia dikoreksi oleh rakyatnya. Tanpa harus tersinggung dan terhina. Setiap kebijakan politik yang diambil oleh seorang khalifah dapat dipertanggungjawabkannya di depan wakil-wakil rakyat. Wakil rakyat secara individual atau kelompok, dapat meminta pertanggungjawaban atas setiap kebijakan politik yang telah diambil seorang khalifah baik secara lisan maupun tulisan.

Dalam tatanan negara Indonesia pemimpin atau khalifah bisa disebut juga kepala desa, yaitu diantara wewenangnya menyusun dan menetapkan anggaran desa dan seorang pemimpin diharuskan untuk selalu berlaku adil terhadap masyarakatnya atau rakyatnya sehingga rakyatnya merasa hak nya diberikan sepenuhnya. Meskipun

begitu terkadang rakyat atau masyarakatnya juga harus ikut andil dan bekerjasama dengan khalifah atau pemimpin untuk terjalannya semua kegiatan yang ingin dicapai.

Mengenai penyusunan terhadap anggaran desa dalam konsep islam bisa diterapkan kepada konsep adil dan amanah, Rasulullah SAW bersabda :

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَرَعِمَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَ إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَ إِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ.

Ada tiga perkara, yang siapapun melakukan tiga perkara tersebut, dia tergolong orang munafik meski dia shaum, shalat dan mengklaim dirinya Muslim yaitu: jika berkata, dusta; jika berjanji, ingkar; dan jika diberi amanah, khianat (Ibn Bathah, Al-Ibânah al-Kubrâ, 2/697).

Selain amanah, seorang pemimpin juga wajib memimpin dengan adil. Sayang, sistem demokrasi sekular saat ini sering melahirkan pemimpin yang tidak adil alias fasik dan zalim. Mengapa? Sebab sistem demokrasi sekular memang tidak mensyaratkan pemimpin atau penguasanya untuk memerintah dengan hukum Allah SWT. Saat penguasa tidak memerintah atau tidak berhukum dengan hukum Allah SWT, jelas dia telah berlaku zalim. Allah SWT sendiri yang menegaskan demikian:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Siapa saja yang tidak memerintah dengan wahyu yang telah Allah turunkan, mereka itulah pelaku kezaliman (al-Maidah [5]: 5).

Alhasil, seorang pemimpin baru bisa dan baru layak disebut sebagai pemimpin yang adil saat memerintah berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah, bukan dengan yang lain.

Oleh karena itu dalam hal menyusun dan menetapkan anggaran desa haruslah diprioritaskan untuk kepentingan bersama.

BAB V

PENUTUP

Pada bab lima ini akan dijelaskan tentang kesimpulan dan saran, yaitu sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal kewenangan penyusunan dan penetapan anggaran desa dibahas bersama untuk kepentingan masyarakat desa, namun pada praktiknya ternyata banyak juga program yang disusun oleh perangkat desa belum menyentuh pemerataan pembangunan dan infrastruktur, sehingga menurut masyarakat mereka merasa tidak diperhatikan oleh pihak

desa.

Faktor-faktor Pendukung dalam menyusun dan menetapkan anggaran desa : Kebutuhan infrastruktur, Adanya anggaran, Kebutuhan kegiatan bersama masyarakat, Adanya keperluan-keperluan mengenai perencanaan desa yang lebih berkembang. Dan Kalau faktor penghambat dalam penyusunan dan penetapan anggaran desa yaitu terkadang ada pencairan dana yang terlambat sehingga perencanaan yang mulanya dibuat tidak semua terealisasi, dan akibatnya banyak masyarakat menilai bahwa dana yang kami anggarkan di gunakan untuk kepentingan aparat desa saja.

B. Saran

Sebagai akhir dari skripsi ini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada kepala desa biak muli untuk lebih melihat kepentingan bersama dan lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Kepada aparat desa biak muli untuk lebih sering turun langsung ke lapangan sehingga jika ada program yang belum dianggarkan dapat dibahas bersama.
3. Kepada masyarakat desa biak muli untuk lebih berpartisipasi terhadap program-program yang dibuat oleh pemerintah desa sehingga terjalin komunikasi yang baik.
4. Kepada teman-teman mahasiswa untuk dapat melanjutkan

penulisan ini, dengan kasus yang berbeda atau di tempat yang berbeda karena penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan serta dapat memberikan masukan kepada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: t.p, 1984.

Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah (Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam)*, terj. Fadhli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2000

Abdul Qodir Djaelani, *Negara Ideal, Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, Bina Ilmu, Cetakan Pertama: Surabaya, 1995

Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Bandung: PT Remaja Rosdakary, 1995.

Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung : Remaja Rosda Karya 2012

Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi*, Jakarta : Balai Pustaka, 2010

Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamental* Magelang: Indonesiatara, 2001

Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan : Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998

Muammar Himawan, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Jakarta : Bina Ilmu, 2004.

M.Jakfar puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, Yogyakarta: Grafindo Lentera Media, 2012

Suwani, *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur*, Istilah: Jurnal Fisip, Administrasi Negara 2016

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Universitas Indonesia, 2014

Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam*, Jakarta: Khalifah, 2004

Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1979

Saduwastion, Irwan Tahir, *Adminitrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2007

Taufiq Rahman, *Moralitas Pemimpin dalam Perspektif al-Qur'an*, Bandung: Pustaka Setia, 1999

Tim Penyusun Kamus Besar Pembinaan Dan Pembangunan Bahasa (P3B) Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan. KeVII, Edisi Ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

JURNAL :

<https://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-prioritas>.

Sumber Data : Arsip Desa kantor Desa Biak Muli 2018-2019

Undang-undang no 6 tahun 2014 pasal 26 ayat

<https://www.keuangandesia.info/2016/07/apb-desa-penganggaran-keuangan-desa.html>

<https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/7672/1/SKRIPSI%20full%20Riski%20Ufa%20Nazilla.pdf>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Biak Muli Kecamatan Bembel Kabupaten Aceh Tenggara pada 07 April 1997, Putri dari pasangan suami istri bapak Iskandar Muda dan Ibu Sakdiah. Penulis menyelesaikan pendidikan SD di SDNegeri 1 Biak Muli, pada tahun 2009 , tingkat SMP dayah perbatasan darul amin tahun 2012 dan tingkat SMA di MAS dayah darul amin tahun 2015 ,kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syar'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mulai masuk tahun 2015.

Laporan Penelitian

(Hasil Interview)

Tanggal : 10 Mei 2020

Waktu : 08.30-09.00

Narasumber : Junaidi

Jabatan : Kepala Desa Biak Muli

1. Bagaimana proses alur penyusunan dan penetapan anggaran desa biak muli ?
2. Apa saja program yang dianggarkan ?
3. Bagaimana bapak menyikapi isu di masyarakat mengenai ketidakmerataan pembangunan dan masyarakat yang merasa kurang di prioritaskan ?

Jawab :

1. Penyusunan atau perancangan anggaran desa itu kami bahas dengan musyawarah desa bersama, kemudian kami atur sehingga menjadi bagus.
2. Banyak program yang direncanakan, pembangunan, pemberdayaan sumber daya masyarakat, dan lain-lain.
3. Intinya kami sudah berusaha membuat yang terbaik akan tetapi memang saya akui belum sempurna nya pembangunan infrastruktur yang kami buat akan tetapi kedepannya akan diperbaiki.

Laporan Penelitian

(Hasil Interview)

Tanggal : 12 Mei 2020

Waktu : 08.30-09.00

Narasumber : Sandra

Jabatan : Sekretaris Desa Biak Muli

1. Bagaimana menurut bapak mengenai penyusunan dan perencanaan anggaran desa apakah sudah berjalan dengan baik ?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dan penunjang program yang bapak rencana kan ?

Jawaban :

1. Menurut saya kami sudah berusaha dengan baik, dan kami akan memperbaiki semua kekurangan walaupun memang belum sepenuhnya terealisasi.
2. Faktor penunjangnya, adanya anggaran, adanya kebutuhan, adanya rasa ingin membuat masyarakat desa berkembang, dan faktor penghambatnya, terkadang program yang kami jalankan tidak sesuai sasaran karena pencairan dana yang kurang mencapai target.